



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKPJ) TAHUN 2023**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

## KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 ini disusun sesuai surat Sekretariat Daerah Nomor : P-25/SETDA/AS.I-PEM/130/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah kepada DPRD, dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2023.

LKPJ ini adalah merupakan rangkuman Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah selama tahun anggaran 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan dengan harapan dapat memberikan informasi yang objektif sekaligus dapat menjadi objek evaluasi atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun bagi Tim Penyusun LKPJ Kepala Daerah.

Demikian LKPJ ini disampaikan untuk bahan lebih lanjut.

Buntok, Februari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BARITO SELATAN**



**EDI SUHARTO, S.Sos**

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 19660306 198608 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
a. Dasar Hukum.....	3
b. Visi dan Misi Kepala Daerah .....	4
1. Visi.....	4
2. Misi .....	5
c. Data Umum Daerah.....	6
1. Data Geografis Wilayah.....	6
2. Jumlah Penduduk .....	8
3. Pertumbuhan Penduduk.....	9
4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) .....	10
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan .....	11
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	11
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	11
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN BELANJA DAERAH.....	12
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	15
3.1 Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan .....	15
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan .....	18
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya .....	18
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN .....	19
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan .....	19
4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya .....	19
4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan dari pemerintah tingkat atasnya.....	19
BAB V PENUTUP.....	20

## BAB I PENDAHULUAN

### a. Dasar Hukum

Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Sesuai peraturan daerah tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :



## b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 adalah **“Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa”**.

Melalui sinkronisasi dan harmonisasi dengan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 maka Misi RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah ;

**MISI 1** : Mempercepat Pengembangan Dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif Dan Berwawasan Lingkungan

**MISI 2** : Memperkuat Ketahanan Daerah Dan Kondisi Politik, Meningkatkan Pelayanan Sosial, Permukiman Dan Mengantisipasi Perubahan Global

**MISI 3** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Profesionalisme Pegawai Yang Efektif, Efisien dan Reformasi Birokrasi

**MISI 4** : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing

**MISI 5** : Mewujudkan Barsel Yang Beriman, Berbudaya Dan Berkesetaraan Gender

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan memiliki Tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

## 4. LKPJ BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATORKI NERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan masyarakat kalimantan tengah yang paham dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	B	B	B	B
2		Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani	85	85	90	100
			Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Persen)	100	100	100	100

## **c. Data Umum Daerah**

### **1. Data Geografis Wilayah**

Secara geografis posisi Kabupaten Barito Selatan terletak membujur atau memanjang Sungai Barito dengan letak Astronomis pada  $1^{\circ} 20' \text{ LU}-2^{\circ} 35'$  dan  $114^{\circ} \text{ BT}-115^{\circ} \text{ BT}$ , dengan luas wilayah 702.009,9 km<sup>2</sup>. Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sebesar 702.009,90 hektar. Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan 5,75 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **1). Batas Administrasi Daerah**

Batas Administrasi Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah wilayah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan pembentukan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah, luas Kabupaten Barito Selatan adalah 12.664 km<sup>2</sup>. Namun setelah pemekaran pada tahun 2002 luas daerahnya menjadi 8.830 km<sup>2</sup>.

Terkait luas Kabupaten Barito Selatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 seluas 8.830 km<sup>2</sup>, Namun berdasarkan perkembangan kesepakatan tata batas administrasi dengan beberapa kabupaten tetangga, antara lain Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Tengah serta update informasi data spatial secara real luas Kabupaten Barito Selatan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2014-2034 dengan luas wilayah 702.009,9 hektar.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/329/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Barito Selatan Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan seluas 702.009,9 hektar.

**Tabel 1. kecamatan Kabupaten Barito Selatan**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	% terhadap luas Kabupaten Barito Selatan
1	Jenamas	662,16	9,43
2	Dusun Hilir	1.369,73	19,51
3	Karau Kuala	825,23	11,76
4	Dusun Selatan	1.133,47	16,15
5	Dusun Utara	1.271,64	18,11
6	Gunung Bintang Awai	1.757,86	25,04
<b>Jumlah</b>		<b>7.020,09</b>	<b>100</b>

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Barito Selatan

## 2). Tofografis dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan dataran rendah di Kabupaten Barito Selatan berada di sepanjang alur Sungai Barito yang berkisar antara 0 – 4 meter dari permukaan laut, kecuali wilayah perbukitan yang merupakan daerah berkapur terletak di sebelah timur di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan daerah rawa-rawa tersebar di seluruh wilayah.

Pada bagian tengah dijumpai perbukitan dengan variasi tofografi dari landai sampai miring, dengan intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Bagian wilayah utara merupakan rangkaian pengunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Kabupaten Barito selatan berasal dari formasi-formasi geologis yang tergolong tua. Berdasarkan formasi batuanannya, potensi kesuburan tanah di Kabupaten Barito Selatan tidak tinggi. Penyebaran formasi batuanannya terdiri dari : Aluvium, endapan sungai dan laut, wilayah berawa dan bergambut, batuan sedimen yang kaya akan



mineral kuarsa. Selain itu terdapat batuan sedimen klasik, mineral kuarsa dengan sedikit material vulkanik, batuan beku, batuan vulkanik tua, menghasilkan tanah yang kaya unsur hara dan batuan metamorf.

Jenis tanah daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang terdapat pada daerah hulu utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Sehingga kondisi tersebut berpengaruh pada jumlah sebaran hunian penduduk, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2. Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan Rumah	Keterangan
1.	Jenamas	2.322	
2.	Dusun Hilir	2.524	
3.	Karau Kuala	3.939	
4.	Dusun Selatan	16.704.	
5.	Dusun Utara	4.253	
6.	G.B.Awai	1.908	
<b>Total Rumah</b>		<b>31.650</b>	

**a. Jumlah Penduduk**

Penduduk Kabupaten Barito Selatan hingga tahun 2022 berjumlah 133.916 Jiwa yang menyebar di 6 Kecamatan, untuk jelasnya dapat dilihat pada table-tabel di bawah ini :

**Tabel 3. Jumlah Kepala Keluarga menurut Kabupaten Barito Selatan**

**Tahun 2023**

No.	Kabupaten	Jumlah Kepala Keluarga	Keterangan
1.	Barito Selatan	44.873	
	<i>Total</i>	<b>44.873</b>	

Sumber : Data Dukcapil Tahun 2023

**Tabel 4. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)*		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jenamas	4.512	4.301	8.813
2.	Dusun Hilir	8.426	7.819	16.245
3.	Karau Kuala	7.977	7.597	15.574
4.	Dusun Utara	8.786	8.181	16.967
5.	G. Bintang Awai	10.104	9.497	19.601
6.	Dusun Selatan	29.743	29.023	58.766
<b>Jumlah</b>		<b>69.548</b>	<b>66.418</b>	<b>135.966</b>

Sumber : Data Dukcapil Tahun 2023

**Tabel 5. Jumlah Kepala Keluarga menurut Kecamatan Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Jenamas	2.929
2.	Dusun Hilir	5.308
3.	Karau Kuala	5.199
4.	Dusun Utara	5.574
5.	Gunung Bintang Awai	6.387
6.	Dusun Selatan	19.476
<i>Total</i>		<b>44.873</b>

Sumber : Data Dukcapil Tahun 2023

## 2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 belum ada update dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Selatan.

### 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

**Tabel 7. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

No.	Ijazah	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Pasca Sarjana (S-2)	5 Orang
2.	Sarjana (S-1)	10 Orang
3.	Sarjana Muda (D- III)	1 Orang
4.	SLTA / Sederajat	4 Orang
5.	Pegawai Tidak Tetap Sarjana (S-1)	6 Orang
6.	Pegawai Tidak Tetap SLTA/Sederajat	14 Orang
	Jumlah	40 Orang

**Tabel 8. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang**

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Golongan IV	4 Orang
2.	Golongan III	13 Orang
3.	Golongan II	3 Orang
	Jumlah	20 Orang

**Tabel 9. Jumlah Pegawai Menurut Eselonering**

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Eselon II.B	1 Orang
2.	Eselon III.A	0 Orang
3.	Eselon III.B	3 Orang
4.	Eselon IV.A	4 Orang
	Jumlah	8 Orang

**Tabel 5. Rincian Keadaan Peg. Badan Kesbang dan Politik  
Kab. Barseel Tahun 2023**

NO.	Jenjang	Jumlah Orang	Golongan																Jlh	
			I				II				III				IV					
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I.	Pejabat Struktural																			
	- Eselon II.B																	1		1
	- Eselon III.A																			
	- Eselon III.B													1	2					3
	- Eselon IV.A													4						7
	<b>Jumlah</b>													5	2		1			8
II.	Pejabat Fungsional												1	4						5
	<b>Jumlah</b>												1	4						5
III.	Pelaksana / Struktural																			
	- S2																			
	- S1												2	2						4
	- D.III																			
	- SLTA									3										3
	- SLTP																			
	- SD																			
	<b>Jumlah</b>									3		2	2							7
IV	Pegawai Tidak Tetap																			
	- S1											6								6
	- SLTA						14													14
	<b>Jumlah</b>						14					6								20
	<b>Jumlah Total</b>						14			3	6	3	11	2			1			40

#### 4. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan tidak mempunyai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### 5. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

No.	Urusan	Belanja Operasi				Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Presentase (%)	SKPD Pelaksana
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Belanja Modal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemerintahan Umum	2.536.107.141	11.414.552.753	23.975.954.500	410.989.550	38.337.604.124	31.363.644.013	81,81	Bakesbangpol

#### 6. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan tidak memiliki pembiayaan.

**BAB II**

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

No.	Program / Sub Kegiatan / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	
		Murni	Perubahan
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	39.961.000,-	82.516.600,-
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.536.107.141,-	2.536.107.321,-
<b>3.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.538.040,-	16.538.040
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,-	52.000.000
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.977.750,-	6.977.750,-
3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	7.707.000,-	7.707.000,-
3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.893.400,-	39.893.400,-
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.138.220,-	163.138.220,-
<b>4.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,-	3.000.000,-
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.709.200,-	46.203.600,-
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315.000.000,-	256.950.000,-
<b>5.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
5.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,-	10.000.000,-
<b>II.</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		
<b>1.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		
1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	13.000.000,-	13.000.000,-
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15.810.000,-	15.810.000,-
1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9.033.427.733,-	9.033.427.733,-
1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	29.856.000,-	29.856.000,-
1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	36.140.000,-	36.140.000,-
<b>III.</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>		

**12. LKPD BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023**

<b>1.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>		
1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.250.000,-	12.250.000,-
1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.787.850.000,-	1.812.849.820,-
1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	32.627.000,-	57.627.000
1.4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	19.620.000,-	19.620.000,-
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>		
<b>1.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		
1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.250.000,-	6.750.000,-
1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10.318.329.500,-	22.238.329.500,-
1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16.738.400,-	41.738.400,-
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		
<b>1.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>		
1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.549.780,-	2.549.780,-
1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	14.235.024,-	14.235.024,-

### 13. LKPJ BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	42.388.966,-	42.388.966,-
1.4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.790.000.000,-	1.740.000.000,-
	<b>Jumlah Total</b>	<b>26.328.104.124,-</b>	<b>38.337.604.124,-</b>

## **BAB III**

### **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

#### **3.1 Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan**

##### **3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja**

Program adalah produk dari perencanaan yang berisi kegiatan atau rangkaian kegiatan berdasarkan perencanaan yang bersumber dari data yang valid dan memadai untuk menghasilkan capaian dan rencana yang telah disusun. Capaian dan rencana yang dimaksud tentunya memiliki suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dibutuhkan program untuk mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang kemudian dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan menetapkan indikator kinerja serta target kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU) yang ingin dicapai setiap tahun selama periode 2023-2026 yang juga dituangkan dalam perjanjian kinerja. Adapun target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDI SUHARTO, S.Sos

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. H.DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si

Jabatan : Pj. BUPATI BARITO SELATAN

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab Pihak Pertama.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 31 Agustus 2023.

PIHAK KEDUA,  
  
Dr. H. DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si

PIHAK PERTAMA,  
  
EDI SUHARTO, S.Sos  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.196603061986081004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO  
SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
1	Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel.	Nilai SAKIP KESBANGPOL	Kriteria	B
2	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman Masyarakat.	1. Persentase gangguan ketertiban umum yang terlangani	Persen	85
		2. Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (persen)	Persen	100

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.171.031.751	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	9.128.233.733	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.842.347.000	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	10.337.317.900	APBD
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.849.173.740	APBD

Buntok, 21 Agustus 2023.

PIHAK KEDUA,  
  
Dr. H. DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si

PIHAK PERTAMA,  
  
EDISUHARTO, S.Sos  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP: 19660306 198608 1 004

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target 2023	Capaian
Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	B	Belum Rilis
Persentase gangguan ketertiban Umum yang tertangani	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	85	100%
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	100%

Adapun penjelasan dari capaian kinerja dari target kinerja adalah :

1. Nilai SAKIP Bakesbangpol atas penilaian LAKIP 2022 hanya mendapat kriteria CC dan akan diperbaiki pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Tahun 2023. Untuk masa evaluasi kinerja SAKIP tahun 2023 akan di evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang akan dilaksanakan pada triwulan pertama di tahun 2024, oleh karena itu untuk laporan nilai SAKIP belum dapat dilaporkan karena evaluasi belum dilaksanakan pada saat pelaporan kinerja ini disusun.
2. Capaian indikator Persentase gangguan ketertiban umum yang tertangani yaitu Capaian indikator ini dihitung dari formula penghitungan yaitu Jumlah kejadian yang ditangani berbanding dengan jumlah kejadian berpotensi konflik dikali 100%.Jumlah konflik yang terjadi ini dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di Kabupaten Barito

Selatan yang di analisis bisa menimbulkan potensi konflik di Kabupaten Barito Selatan. Jumlah konflik yang terjadi dan terdata pada bulan Januari hingga Desember 2023 terjadi 1 kejadian yang ditangani dan berpotensi konflik 1 kejadian. Adapun cara perhitungannya sebagai berikut :

Jumlah kasus yang tertangani Tahun 2023 : 1 Kasus

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum yang tertangani Tahun } N}{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum yang terdata Tahun } N} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100\% = \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

3. Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif dengan capaian kinerja 100%. Capaian Indikator Ormas dihitung dari formula perhitungan yaitu jumlah Ormas, LSM dan OKP aktif berbanding dengan jumlah Ormas, LSM dan OKP yang terdaftar. Adapun cara perhitungannya sebagai berikut :

Jumlah Ormas, LSM dan OKP aktif yang diberikan pembinaan Tahun 2023 :

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Jumlah Ormas, LSM dan OKP aktif Tahun } N}{\text{Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang terdaftar Tahun } N} \times 100\% \\ &= \frac{20}{20} \times 100\% = \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

### 3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Urusan Penunjang Sesuai dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian kinerja keluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 telah menunjukkan capaian yang diharapkan yang secara rinci terlihat pada tabel dibawah ini :

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Keluaran	
		Target	Capaian
1	2	3	4
<b>PEMERINTAHAN UMUM DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Presentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	99%
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Capaian Kinerja Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	26 orang

## 19. LKPJ BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023



<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	1 paket
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	96,6%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air & listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & listrik	12 Laporan	12 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	11 Laporan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	100%	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	29 Unit	29 Unit
<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Presentase Masyarakat yang Mengerti tentang wawasan Kebangsaan</b>	100%	90%
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	100%	90%
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Dokumen	4 Dokumen
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Dokumen	4 Dokumen
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 Orang	78 Orang
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	50 Orang
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 Laporan	10 Laporan

## 20. LKPJ BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Presentase Capaian Efektifitas Penguatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	100%	100%
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Presentase Capaian Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	100%	100%
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	384 Orang	384 Orang
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	126 Orang	126 Orang
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5 Laporan	5 Laporan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Presentase Capaian Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif</b>	100%	100%
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	100%	100%
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen

## 21. LKPJ BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	56 Orang	56 Orang
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	12 Laporan
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Presentase Potensi terjadinya Konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani</b>	100%	100%
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Presentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	100%	100%
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	100%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	100 Orang
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	150 Orang
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Tabel Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
PEMERINTAHAN UMUM DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BAKESBANGPOL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Masih dalam Tahap Evaluasi untuk LAKIP 2023	Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan Sistem Perencanaan	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Masyarakat yang Mengerti tentang wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Paham tentang Wawasan Kebangsaan	dalam kehidupan bermasyarakat terkesan rendahnya atau makin lunturnya kesadaran akan pemahaman terhadap Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar berbangsa dan bernegara	Meningkatkan kembali kesadaran kebangsaan dan bernegara dengan mengingatkan kembali akan nilai-nilai kebangsaan
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Capaian Efektifitas Penguatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Terlaksananya Pendidikan Politik bagi Masyarakat dan Pengurus Partai Politik	Euforia politik masyarakat dengan adanya reformasi politik berupa pemilihan langsung belum diimbangi dengan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat yang memadai	Meningkatkan kesadaran politik masyarakat yang elegan dengan lebih banyak memberikan pencerahan serta melibatkan masyarakat secara langsung
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Capaian Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	Terlaksananya Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	Terbatasnya Anggaran dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Ormas	Menyampaikan Usulan pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan telah disetujui/ mendapat Alokasi tambahan Anggaran
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Potensi terjadinya Konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani	Tertanganinya Potensi Konflik terkait IPOLEKSOSBUD	Masih rendahnya pengawasan dini terhadap masalah-masalah terkait IPOLEKSOSBUD	Meningkatkan Pencegahan Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD melalui deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat



### 3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Menghilangkan kemungkinan terjadinya konflik SARA	Pasal 28 ayat (2) UU ITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang kemungkinan terjadinya konflik SARA</li> <li>- Membantu terciptanya kondusif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa</li> </ul>
2.	Menyalurkan bantuan dana partai politik	PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BARITO SELATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersalurnya bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Barito Selatan</li> </ul>

### 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Memper memudahkan penyaluran dana bantuan partai politik disalurkan melalui KESBANGPOL	Untuk di koordinasikan dengan kesbangpol provinsi dan BPKAD	Memper memudahkan dan meringankan syarat serta waktu penyaluran dana bantuan partai politik

## **BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

### **4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan**

#### **4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah tingkat atasnya.

#### **4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan dari pemerintah tingkat atasnya**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah tingkat atasnya.

## **BAB V PENUTUP**

- A. Permasalahan. yang ditemukan dalam pelaksanaan Urusan Pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :
1. Di era reformasi dengan tidak adanya Badan Penyelenggara Pendidikan dan Pengamalan Pedoman Penghayatan dan Pendidikan Moral Pancasila (BP-7), dalam kehidupan bermasyarakat terkesan rendahnya atau makin lunturnya kesadaran akan pemahaman terhadap Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar berbangsa dan bernegara.
  2. Euforia politik masyarakat dengan adanya reformasi politik berupa pemilihan langsung belum diimbangi dengan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat yang memadai, dan di sisi lain peraturan yang berubah-ubah memunculkan stigma dalam masyarakat bahwa reformasi politik dan demokrasi di Indonesia terkesan masih belum matang.
- B. Solusi yang ditawarkan adalah :
1. Meningkatkan kembali kesadaran bebangsa dan bernegara dengan mengingatkan kembali akan nilai-nilai kebangsaan.
  2. Meningkatkan kesadaran politk masyarakat yang elegan dengan lebih banyak memberikan pencerahan serta melibatkan masyarakat secara langsung
- C. Himbauan :
1. Belum tersedianya aparatur sipil yang memenuhi kualifikasi menempati jabatan.
  2. Belum adanya Perbup Standar Pelayanan Minimal Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

Buntok, Februari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BARITO SELATAN**



**EDI SUHARTO, S.Sos**

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 19660306 198608 1 004